



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025- 2029 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang

perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya berkenaan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 08 DESEMBER 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,
ttd

PETRUS USKONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



DINA MARLINA FUNU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	$\frac{\text{Publikasi informasi Partai Politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah Publikasi informasi}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi	Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten TTU	Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten TTU
2	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota “Baik”	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: penilaian dengan kategori “Baik’ dari indeks reformasi birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten TTU	Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten TTU
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitasi Kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten TTU	Laporan Kinerja KPU Kabupaten TTU

4	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Opini BPK	Opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Laporan Keuangan KPU Kabupaten TTU
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten TTU	Surat Keputusan KPU Kabupaten TTU tentang Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten TTU
6	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten TTU	Laporan Sosialisasi KPU Kabupaten TTU
7	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pemilih Perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten TTU	Laporan Sosialisasi KPU Kabupaten TTU
				$\frac{\text{Jumlah Pemilih Perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100 \%$			
8	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten TTU	Laporan Sosialisasi KPU Kabupaten TTU

9	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepilluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{Target\ DPTb - (Realisasi\ DPTb - target\ DPTb)}{Jumlah\ target\ Pemilih\ DPTb\ yang\ tidak\ masuk\ dalam\ DPT}$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan	Sub bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten TTU	Berita Acara Data Pemilih Berkelanjutan
10	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Terwujudnya penyelenggaraan kepilluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	$\frac{Jumlah\ penyelenggaraan\ sesuai\ jadwal\ dan\ ketentuan}{Jumlah\ Total\ KPU} \times 100\ \%$ <i>yang menyelenggarakan Pemilu</i>	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten /Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten TTU
11	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	$\frac{Jumlah\ penyelenggaraan\ yang\ aman\ dan\ damai}{Jumlah\ total\ KPU\ yang\ menyelenggarakan\ Pemilu} \times 100\ \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang berlangsung secara aman dan damai	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten TTU	Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten TTU

NO	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Penangung Jawab	Sumber Data
12	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah Total Sengketa Hukum KPU Provinsi/Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten TTU	Laporan Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten TTU
12	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah Total Sengketa Hukum KPU Provinsi/Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten TTU	Laporan Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten TTU

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TTD

PETRUS USKONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



DINA MARLINA FUNU